

Kuasa *Opinion Leader* di Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Etnografi Kritis Desa Wisata Plunturan Kabupaten Ponorogo)

¹Yulian Ibra Amiftakhul, ²Merry Fridha Tri Palupi, ³Herlina Kusumaningrum

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

hitme.yulian@gmail.com

Abstract

In 2020, Plunuran Village declared itself a tourist village with the Dolan Plunturan branding. However, the data from BPS Province of East Java shows that the number of visits by foreign and local tourists to Plunturan Village has tended to decrease to 85% from April to December 2020, this is inversely proportional to the branding that has been echoed by the community and village officials. However, the development of Plunuran Tourism Village has stagnated, the role of stakeholders has been eroded by the opinion leaders. This research is a qualitative research, with Birmingham's theory of Hegemony of Power, through a critical paradigm. Researchers found several things in the power of opinion leaders in the development of Tourism Villages (Critical Ethnographic Study of Plunuran Tourism Village). The opinion leader's powers in this case are Mr. Sutrisno and Mbah Ghani as key opinion leaders who are respected and respected by the local residents hegemony over power by making village tourism plans without coordinating with the village government, so that researchers consider the role of this opinion leader to overstep the role of the village government, for example in the case tourism village development (UMKM Mugi Berkah Lestari).

Keywords: *Tourism Village, Critical Ethnography, Hegemony, Opinion Leader, Stakeholder*

Abstrak

Pada 2020 lalu, Desa Plunturan mendeklarasikan diri sebagai desa wisata dengan *branding* Dolan Plunturan. Akan tetapi, data dari BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal di Desa Plunturan cenderung menurun hingga menginjak persentase 85% sejak April hingga Desember 2020, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan *branding* yang selama ini digaungkan oleh masyarakat dan perangkat desa. Namun perkembangan Desa Wisata Plunturan ini mengalami stagnansi, peranan *stakeholder* yang terkikis oleh *opinion leader*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teori Hegemoni Kekuasaan Birmingham, melalui paradigma kritis. Peneliti menemukan beberapa hal dalam kuasa *opinion leader* dalam pengembangan desa Wisata (Studi Etnografi Kritis Desa Wisata Plunturan). Kuasa *opinion leader* dalam kasus ini adalah Pak Sutrisno dan Mbah Ghani sebagai *key opinion leader* yang disegani dan dihormati oleh warga sekitar menghegemoni kekuasaan dengan cara membuat rencana desa wisata tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa sehingga peneliti menganggap peran

opinion leader ini melangkahi peran pemerintah desa, contohnya dalam kasus pengembangan desa wisata (UMKM Mugi Berkah Lestari).

Kata Kunci : Desa Wisata, Etnografi Kritis, Hegemoni, Opinion Leader, Stakeholder

Pendahuluan

Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mulai memperkenalkan eksistensinya dengan menjadi salah satu desa wisata yang mengembangkan budaya Jawa seperti kesenian karawitan, seni tari cokedan, dan tarian Reog. Dengan *branding* Dolan Plunturan Desa Plunturan mendeklarasikan diri sebagai desa wisata. Saat ini Desa Plunturan dipimpin oleh Dwi Bintoro selaku kepala desa yang secara langsung memiliki peran dalam mengembangkan kawasan desa wisata tersebut. Selain Dwi Bintoro, juga terdapat *Opinion Leader* lainnya yang juga memiliki peran di Desa Plunturan, seperti pelaku Ketua Reog Desa Wisata Plunturan dan Trisno selaku Ketua Karang Taruna Desa Wisata Plunturan sekaligus Ketua Pokdarwis setempat. Hubungan yang terjalin oleh masyarakat bersama pemangku kepentingan desa yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan melestarikan budaya lokal kemudian menciptakan tujuan individu yang berkaitan dan saling berhubungan. Dalam hal ini, Kepala Desa kemudian berperan sebagai seorang aktor politik yang memiliki tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki dengan cara menggunakan kekuatan dan kekuasaannya.

Opinion leader sebagai aktor-aktor komunikasi dalam pengembangan Desa Wisata Plunturan juga ialah salah satu faktor penting dalam ekosistem desa wisata sehingga seperti sekarang. Melalui Jurnal yang ditulis oleh Fanani Efendi dengan judul *Peran Opinion Leader dalam Mensosialisasikan Kampung Tangguh Covid 19 di Desa Wage Sidoarjo* menjelaskan bahwa *opinion leader* melalui sudut pandang Rogers adalah mediator tidak langsung dari berbagai informasi yang diterima untuk diteruskan kepada masyarakat. *Opinion Leader* juga memiliki karakteristik yang dikelompokkan menjadi *opinion leader* aktif; yaitu orang yang sengaja mencari penerima atau pengikut untuk menyebarkan informasi, dan *opinion leader* pasif; yaitu orang yang membiarkan pengikutnya untuk menjadi lebih aktif dalam mencari informasi yang kemudian akan disampaikan kepada pemimpin opininya (Efendi, 2020).

Peran aktor *opinion leader* yang ada di Desa Plunturan rupanya masih terpecah pada beberapa segmen, seperti pengelolaan yang tidak terstruktur dan terperinci kepada satu pemimpin, melainkan dibagi kepada beberapa *opinion leader* yang dianggap mampu menguasai bidangnya masing-masing dan dituakan. Atas pengelompokan yang tidak terpusat itulah kemudian melahirkan sebuah dualisme *opinion leader*, yaitu terdapat adanya pertentangan antara dua prinsip layaknya kebaikan dan keburukan, pro dan kontra, pengelolaan yang cepat atau lambat. Dalam Desa Plunturan, dualisme *opinion leader* yang terlihat adalah terdapat perbedaan kepemimpinan, sehingga melahirkan adanya perbedaan pandangan pada tiap *opinion leader* dan menganggap bahwa mereka memiliki relasi atas kuasa-kuasa yang ada. Dalam kehidupan modern, hubungan kekuasaan kemudian menciptakan sebuah sifat bergantung satu sama lain, baik dari pihak yang memegang kekuasaan, ataupun pihak yang menjadi subjek kekuasaan.

Berdasarkan jurnal yang berjudul *Pengembangan Desa Wisata melalui Good Tourism Governance pada Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur* menyimpulkan bahwa sebetulnya perangkat desa dan POKDARWIS di Desa Plunturan sudah terlibat secara keseluruhan, hal tersebut dibuktikan oleh MoU desa dengan beberapa pihak, seperti akademisi pengadaan pelatihan pengembangan SDM (Pangestu, 2023). Akan tetapi, perangkat desa yang ada masih belum memperhatikan bagaimana perkembangan

intelektual dan kesadaran masyarakat setempat terkait dengan keikutsertaannya untuk bersama-sama dalam mengembangkan desa.

Beberapa tahun sebelumnya juga telah ada penelitian yang ditulis oleh Manopo pada 2013 silam dengan topik serupa yang berjudul *Peranan Opinion Leader dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Menunjang Program Bersih Eceng Gondok Danau Tondano*, namun hasil dari beberapa penelitian tersebut hanya berfokus pada desa wisata rintisan yang menjadi satu-satunya desa wisata yang mengusung tema budaya dan kesenian sebagai nilai yang ditonjolkan serta bagaimana usaha para pemimpinnya dalam menciptakan peran *opinion leader* untuk menyampaikan pesan demi meningkatkan peran masyarakat dalam partisipasi desa.

Sementara pada penelitian ini, selain untuk mengulik bagaimana peran masyarakat dan *opinion leader* yang terlibat, penulis juga akan membongkar mengapa seorang kepala desa di Desa Plunturan yang idealnya dapat dijadikan sebagai *top leader* serta pemikir utama dalam pengembangan desa, namun pada fakta lapangan justru menunjukkan bahwa kepala desa tersebut tidak menjadi penentu utama, melainkan terpecah menjadi beberapa pemimpin. Serta bagaimana praktik hegemoni yang terjadi di dalam Desa Plunturan, yang nantinya dapat dikaitkan sebagai penghubung terhadap proses berjalannya kemajuan dan kemunduran desa. Penelitian ini diharapkan mampu membongkar dan menelisik bagaimana peran *opinion leader* dalam menyampaikan komunikasi dan menciptakan relasi antar sesama yang terjadi di Desa Plunturan ketika menentukan strategi untuk mengembangkan desa wisata tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena yang sedang dialami subjek penelitian, baik meliputi tindakan, perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain. Penelitian kualitatif juga menggunakan proses pengolahan kata, pembongkaran ideologi dan makna secara deskriptif berdasarkan gambaran dari perilaku subjek ataupun objek yang diteliti (Moleong, 2017).

Penelitian ini dibatasi oleh pendapat Antonio Gramsci mengenai konsep relasi kuasa melalui teori hegemoni kekuasaan. Hegemoni merupakan konsep yang dipahami sebagai seorang yang dikuasai harus bisa mematuhi penguasanya, yang dikuasai tidak hanya harus merasa memiliki nilai serta norma penguasa, namun mereka juga harus memberikan persetujuan atas subordinasi mereka (Sugiyono, 2017). Mencakup pada skala penelitian yang bersumber dari penerapan teori mazhab kritis. Metode etnografi kritis mengasumsikan kepentingan penelitian yang prinsip utamanya dipengaruhi oleh pemahaman dan tanggung jawab etis atas proses ketidakadilan pada aspek tertentu yang melingkupi kehidupan masyarakat. Etnografi kritis juga berdasar pada prinsip atas tanggung jawab moral dalam membebaskan dan menyelamatkan ketertindasan masyarakat, baik dalam segi budaya, politik, dan ekonomi. Etnografi kritis adalah metode kualitatif yang mampu memberikan *aufklarung* atau pencerahan serta perubahan atas pemikiran pada subjek yang akan diteliti. Dengan menyuarakan suara melalui pihak-pihak yang merasa tertindas, maka akan tercipta sebuah kritik akan suatu dominasi ideologi yang mampu merubah sudut pandang masyarakat menjadi lebih adil sehingga mampu memfasilitasi perubahan tersebut. Etnografi kritis sering dikaitkan dengan kungkungan kekuasaan, ketidakadilan atau ideologi tertentu. Kekhususan etnografi kritis membuat prosedurnya memiliki berbagai ciri khas. Dengan demikian, etnografi kritis menjadikan penelitian sebagai sebuah usaha transformatif dalam menyempurnakan dan membangun kesadaran emansipatoris. Para peneliti etnografi kritis memperlihatkan sikap memihak mereka demi memperjuangkan sebuah dunia yang lebih baik.

Pembahasan

Stakeholder atau perangkat kebijakan yang ada di Desa Plunturan seharusnya dianggap sebagai pemimpin yang mampu membina warganya dengan baik, sehingga melalui tindakan tersebut mampu menciptakan makna berkesan di hati ataupun mata para warganya. Di Desa Plunturan juga terdapat hierarki yang terbentuk untuk memimpin jalannya kebijakan ataupun pemerintahan desa. Akan tetapi, melalui proses hierarki tersebut, ada beberapa *stakeholder* yang tidak berperan secara penuh dikarenakan tidak ingin mendengarkan suara dari masyarakatnya sendiri.



Keterangan

- : Suara yang didengar
- : Suara yang tidak didengarkan

Melalui bagan di atas, maka dihasilkan penelitian berdasarkan riset yang telah dilakukan, bahwa peneliti menemukan adanya ketimpangan asumsi dan posisi yang dirasakan baik melalui warga ataupun *stakeholder* yang ada. Gramsci kemudian membagi tipe khalayak tersebut ke dalam tiga kategori diantaranya *Integral* (hegemoni total), *Decadent* (hegemoni merosot) dan *Minimum* (hegemoni minimum). Melalui penelitian ini berbagai macam sikap khalayak dapat ditentukan ke dalam tipe audiens berdasarkan resepsi informan terkait kuasa *opinion leader* di dalam pengembangan Desa Wisata Plunturan (studi etnografi kritis Desa Wisata Plunturan Kabupaten Ponorogo).

Sikap dan anggapan yang terjadi pada masyarakat sejatinya tercipta berdasarkan sikap dan sifat hegemoni yang dilakukan oleh para *opinion leader* yang ada. Para *stakeholder* yang tidak berperan secara maksimal kemudian menciptakan ketimpangan terhadap masyarakat, imbasnya banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemimpin mereka masih belum mengena secara menyeluruh.

“Ya orang-orang itu. Pak Sutrisno, Mbah Lurah dan paling Bu Lurah.”

(narasumber Warga Desa, Ibu Winarti, 43 tahun, wawancara mendalam, 22 Mei 2023)

Dari wawancara dan observasi Penulis, menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh *stakeholder* yang berkedudukan di Desa Wisata Plunturan belum digunakan secara maksimal.

Ibu Kristanti, dan Bu Ida Royani menyebutkan hal yang sama bahwa mereka lebih menghargai Pak Sutrisno sebagai *opinion leader* saat saat pengembangan Desa Wisata Plunturan. Sedangkan peran *stakeholder* sendiri menjadi tergeser. Bahkan untuk membuat organisasi, pada awalnya Organisasi UMKM Mugi Berkah Lestari ini didirikan oleh Pak Sutrisno dengan Pokdarwisnya sebelum akhirnya disahkan oleh pemerintah desa.

“.. Kalau konteksnya adalah Mbah Lurah dan mas tris mungkin ya Mbah Lurah merasa terlangkahi, tapikan balik lagi itu niatnya membantu. Ya ntah sih mas. Saya tidak berani bicara banyak.”

(narasumber ketua BPD, Pak Padmo, 55 tahun, wawancara mendalam, 24 Mei 2023)

Pak Padmo saat ditanya mengenai wewenang secara tidak langsung mengakui jika Mbah Lurah mungkin merasa terlangkahi wewenangnya. Namun Pak Padmo merasa itu adalah sebuah bantuan dari bawahan kepada atasan. Namun, pada praktiknya, warga lebih melihat kinerja Pak Sutrisno sebagai *opinion leader* daripada dengan *stakeholder*.

Hegemoni pada dasarnya merupakan konsep yang dipahami sebagai seorang yang dikuasai harus bisa mematuhi penguasanya, yang dikuasai tidak hanya harus merasa memiliki nilai serta norma penguasa, namun mereka juga harus memberikan persetujuan atas subordinasi mereka. Dalam kasus ini, didapati bahwa hegemoni yang dilakukan oleh beberapa *opinion leader* kepada warga dalam pengembangan desa terlihat begitu jelas. *Opinion leader* merasa memiliki kuasa lebih dan harus selalu didengar oleh para warganya, tidak peduli hal tersebut akan baik atau justru menimbulkan dampak buruk bagi warganya. Kepala desa nampaknya juga merasa terhegemoni dikarenakan beberapa *opinion leader*.

“Organisasi itu terusan dari pelatihan Mas Ibra kok. .. Saya merasa terbantu dengan organisasi tersebut, namun rasanya kok kurang follow up saja ya, masa organisasi mati. Untuk Mbah Lurah atau pemdes kurang ngoyak toh mas, haruse kan tugas mereka ya. Malah Pak Sutrisno dan Pak Gotri, Mereka yang sejak awal ngobrak-ngobrak kita, jadi saya merasa mereka layak untuk didengarkan. Seperti itu Eman-eman ya mas, hehe. Seharusnya ada tindak lanjut sih. Soalnya dampaknya nyata sekali saya rasakan.”

(narasumber Warga Desa, Ibu Ida Royani, 40 tahun, wawancara mendalam, 22 Mei 2023)

Jawaban tersebut menunjukkan bahwasannya narasumber sebetulnya sudah berperan sesuai dengan kapasitasnya, yakni pelaku UMKM untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayah tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak terdorong secara maksimal dikarenakan masih ada beberapa warga yang masih tidak peduli, selain itu peran *Stakeholder* yang ada juga masih belum terjalin secara maksimal. Warga beranggapan bahwa sebagai seorang Kepala Desa yang seharusnya memiliki sifat dalam mengayomi dan menuntun warga, justru tidak dimanfaatkan dengan baik.

Ini merupakan salah satu bentuk nyata dari hegemoni minimum, di mana para kelompok hegemoni tidak dapat menyesuaikan kepentingan dan pemikiran mereka dengan kehidupan bermasyarakat. Tingkatan ini bersandar pada kesatuan ideologis antara kaum elit ekonomi, politisi, dan intelektual yang terjadi secara bersamaan namun terdapat keengganan pada tiap campur tangan massa yang dilakukan. Mereka justru mempertahankan peraturan dan kepentingannya sendiri melalui pemikiran budaya, politik, ekonomi, dan sosial yang

secara garis besar bertentangan dengan ideologi utama yang dimiliki oleh kelompok dominan tersebut.

“Saya merasa tidak pernah menekan, Mas. Saya pasrahkan. Wong kadang saya nek bicara juga kurang didengarkan. Namun seringkali juga didengarkan. Saya tidak tahu hati mereka sih Mas. Saya merasa terbantu sebenarnya, namun saya sendiri tidak tahu

isi hati warga gitu. Ya saya benar-benar sadar kalau saya jarang didengar sih. Mungkin karena saya tidak pernah turun langsung ya ke lapangan. Ya sudah, saya terima konsekuensi itu. Saya sendiri sadar jika mungkin ada kepala dusun yang tidak suka dengan saya, kontra dengan keputusan saya. Kalau jenengan tanya jujur, ya saya tidak munafik ada nggundrelnya. Namun saya berusaha membuktikan dan profesional saja kiranya bagaimana.”

(narasumber Kepala Desa, Bapak Dwi Bintoro, 40 tahun, wawancara mendalam, 23 Mei 2023)

Melalui pernyataan tersebut seolah menunjukkan bahwa Bapak Dwi Bintoro selaku Kepala Desa memang kurang memiliki peran dan pengaruh yang begitu besar. Bapak Dwi Bintoro dianggap kurang mampu membangun kedekatan emosional secara langsung dengan para warganya, sehingga pendapat dan suaranya kurang didengar oleh masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan *gap* antara warga dengan Kepala Desa yang ada, sehingga warga setempat juga enggan untuk berkecimpung secara langsung dengan para *opinion leader* yang ada. Terlihat juga bahwa Bapak Dwi Bintoro sebagai salah satu pemegang *hierarki* tersebut juga termarginalkan, di mana masih ada beberapa *stakeholder* seperti kepala dusun yang tidak suka dengannya di belakang. Hal tersebut juga mampu menjadi salah satu faktor atas lahirnya hegemoni kepada sesama pemegang kekuasaan. Para *opinion leader* dan *stakeholder* sudah seharusnya memiliki satu pikiran, visi, dan misi, akan tetapi yang terjadi pada Desa Wisata Plunturan justru masih ada jajaran yang diasingkan. Melalui hal tersebut, terjadilah fenomena Hegemoni Minimum. Di mana mereka justru mempertahankan peraturan dan kepentingannya sendiri melalui pemikiran budaya, politik, ekonomi, dan sosial yang secara garis besar bertentangan dengan ideologi utama yang dimiliki oleh kelompok dominan tersebut.

“Mereka ya banyak manut kok sama saya. Terutama Pak Sutrisno itu, wes dia itu bagus pol mas. Sek enom ya, jadi banyak tenaganya.”

(narasumber Seniman Reog, Mbah Ghani, 79 tahun, wawancara mendalam, 24 Mei 2023)

Melalui pernyataan ini seolah menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara penerimaan proses komunikasi. Warga sekaligus tokoh masyarakat lebih sering menuruti Mbah Ghani, termasuk ketua Pokdarwis itu sendiri, yaitu Bapak Sutrisno. Padahal, seharusnya sebagai seorang Seniman Reog, beliau bisa mendengarkan dan menukar pikirannya dengan Bapak Dwi Bintoro selaku Kepala Desa setempat sekaligus Ketua Reog Ponorogo, terlepas Mbah Ghani lah tokoh yang menciptakan cerita Bantarangin sejak tahun 1972.

Atas hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek hegemoni menerapkan hegemoni merosot dan minimum. Hegemoni merosot yang ada ditandai dengan adanya keikutsertaan warga yang tidak dilakukan secara penuh, seperti beberapa warga ada yang mendengarkan arahan para *stakeholder*, dan beberapa sisanya justru enggan. Sementara hegemoni minimum dapat dilihat melalui sikap masyarakat yang tidak mau mendengarkan Kepala Desa, dikarenakan Kepala Desa tersebut justru tidak didengarkan dan sering ditentang

pendapatnya. Selain itu, ada juga warga yang merasa kesulitan dalam mengakses informasi dengan para *opinion leader*, dikarenakan media komunikasi yang digunakan hanya melalui Grup *WhatsApp*, sementara masih banyak warga yang kesulitan dalam mengakses media komunikasi dalam jaringan.

Peneliti menemukan beberapa hal dalam kuasa *Opinion Leader* dalam pengembangan Desa Wisata (Studi Etnografi Kritis Desa Wisata Plunturan). Kuasa *Opinion leader* dalam kasus ini adalah Pak Sutrisno dan Mbah Ghani sebagai key opinion leader yang disegani dan dihormati oleh warga sekitar menghegemoni kekuasaan dengan cara membuat rencana desa wisata tanpa berkoordinasi dengan pemerintah Desa sehingga peneliti menganggap peran opinion leader ini melangkahi peran pemerintah Desa contohnya dalam kasus pengembangan desa wisata (UMKM Mugi Berkah Lestari). Namun kepala Desa tidak menyadari bahwa posisinya terhegemoni.

Penutup

Terdapat adanya dua tipe khalayak terhegemoni melalui sudut pandang Antonio Gramsci, hegemoni minimum. Dalam proses pengembangan desa, para *opinion leader* menganggap bahwa keputusan mereka sudah tepat, hingga secara tidak sadar mereka menjadi seorang aktor dominasi hegemoni minimum, di mana ideologi dan pola pikir yang mereka bawa sebetulnya tidak cocok bagi masyarakat sekitar. Kepala desa selaku pejabat di desa tersebut juga merasa kurang didengarkan, posisinya juga beberapa kali tergeser oleh para pemangku lainnya.

Peneliti menemukan beberapa hal dalam kuasa *Opinion Leader* dalam pengembangan Desa Wisata (Studi Etnografi Kritis Desa Wisata Plunturan). Kuasa *Opinion leader* dalam kasus ini adalah Pak Sutrisno dan Mbah Ghani sebagai key opinion leader yang disegani dan dihormati oleh warga sekitar menghegemoni kekuasaan dengan cara membuat rencana desa wisata tanpa berkoordinasi dengan pemerintah Desa sehingga peneliti menganggap peran opinion leader ini melangkahi peran pemerintah Desa contohnya dalam kasus pengembangan desa wisata (UMKM Mugi Berkah Lestari).

Beberapa warga serta tokoh masyarakat lebih mempercayai tokoh lain dibandingkan dengan kepala desa itu sendiri. terlihat bahwa para warga sekitar tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses perumusan desa wisata, sehingga mereka merasa termarginalkan hingga menimbulkan hegemoni merosot dan menjadi kaum yang terhegemoni.

Daftar Pustaka

- Efendi, F., Yuliyanti, T., & Romadhan, M. I. (2020). Peran Opinion Leader dalam Mensosialisasikan Kampung Tangguh Covid 19 di Desa Wage Sidoarjo. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*.
- Efendi, F., Yuliyanti, T., & Romadhan, M. I. (2020). Peran Opinion Leader dalam Mensosialisasikan Kampung Tangguh Covid 19 di Desa Wage Sidoarjo. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.